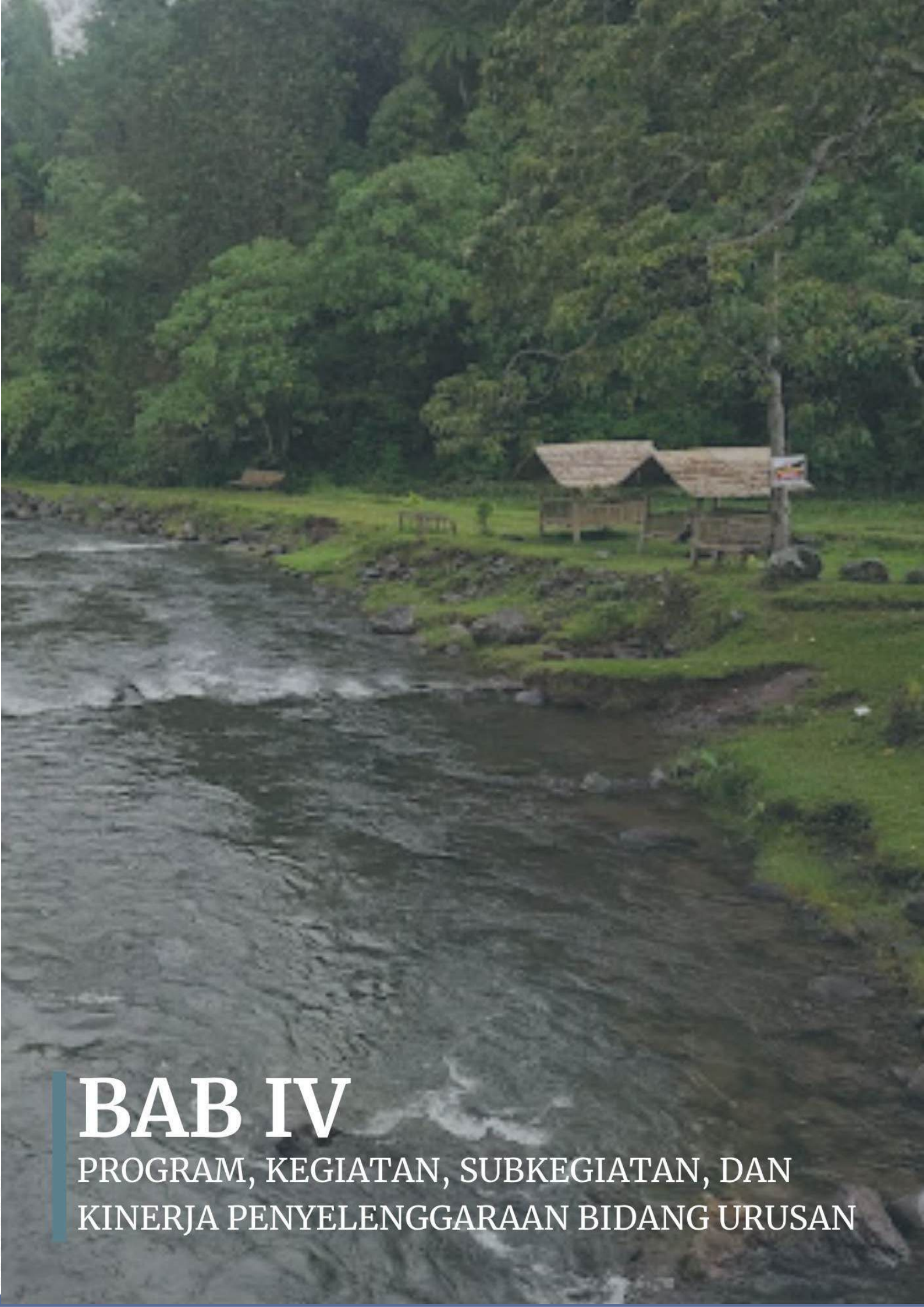




BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan menyajikan arah operasional dari kebijakan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong yang disusun secara sistematis berdasarkan kewenangan urusan perencanaan pembangunan daerah. Setiap program dan kegiatan dirancang untuk merespons isu-isu strategis pembangunan lintas sektor dan memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, dengan fokus pada peningkatan kualitas perencanaan, efektivitas penganggaran, serta daya saing wilayah. Dalam penyusunannya, program-program tersebut juga mempertimbangkan perkembangan kebijakan nasional dan regional, agar mampu mempercepat pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah daerah secara konsisten, terarah, dan berkelanjutan.

IV.1. Program

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah dirumuskan, Bappeda Kabupaten Rejang Lebong perlu menetapkan program dan kegiatan indikatif yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan ini dimaksudkan sebagai bentuk operasionalisasi dari visi, misi, serta arah kebijakan pembangunan daerah ke dalam langkah-langkah implementatif yang terukur dan sistematis. Program dan kegiatan yang disusun dalam dokumen ini akan menjadi dasar bagi Kabupaten Rejang Lebong dalam meningkatkan dan memaksimalkan potensi daerah antara lain ;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
4. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah.
5. Program Riset Dan Inovasi Daerah.

Seluruh program dan kegiatan yang dirumuskan dalam dokumen ini merupakan bagian integral dari program prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian target-target strategis sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025–2029. Rencana program dan kegiatan tersebut disusun secara sistematis untuk memastikan keterkaitan yang erat antara perencanaan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong dengan arah kebijakan pembangunan daerah secara keseluruhan.

IV.2. Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dirancang secara terstruktur dan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong, khususnya dalam bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Setiap kegiatan difokuskan untuk memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas

perencanaan, pelayanan publik, dan daya saing wilayah. Penyusunan kegiatan ini juga memperhatikan perkembangan pembangunan nasional dan regional, termasuk potensi kerja sama antarwilayah yang strategis. Adapun jenis kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat daerah
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
 - a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
 - b. Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah
3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia
 - b. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Dan SDA (Sumber Daya Alam)
 - c. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan
4. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
 - a. Pengembangan Inovasi dan Teknologi
5. Program Riset Dan Inovasi Daerah
 - a. Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan

IV.3. Subkegiatan (kinerja, indikator, target dan pagu indikatif)

Pada bagian ini disajikan rincian mengenai subkegiatan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong, lengkap dengan kinerja, indikator, target tahunan, dan pagu indikatif yang disusun untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah secara terukur dan efisien. Penyusunan tabel ini mengacu pada pendekatan anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*), yang menghubungkan secara langsung antara penggunaan anggaran dengan hasil yang ingin dicapai.

Tabel IV.1 Merumuskan Program, Kegiatan dan Subkegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
5.01.5.05.0.00.26.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah							
- Meningkatkan transformasi digital dan inovasi daerah - Meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah, meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Meningkatnya tata kelola pemerintah pada BAPPEDA		Nilai SAKIP (Nilai)		
					Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Indeks)		
					Persentase Kebijakan Berbasis Bukti (Persentase)		
					Indeks Inovasi Daerah (Angka)		
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)		
					Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel dan tepat Waktu (%)	5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Bappeda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Tersusunnya administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Terselenggaranya pengelolaan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN	
				Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel		
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
				Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
					Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		5.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		5.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
		Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja Pembangunan Daerah				Nilai Sakip Komponen Perencanaan Kinerja (Nilai)		
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah			Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra/PD (persentase)	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra/PD (persentase)	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
					Persentase program prioritas nasional yang didukung program daerah (persentase)	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya perencanaan dan pendanaan		Jumlah berita acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	5.01.02.2.02.0001 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Meningkatnya pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Meningkatnya koordinasi, asistensi, sinergisitas dan monitoring perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Meningkatnya koordinasi, asistensi, sinergisitas dan monitoring perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5.01.03.2.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Meningkatnya koordinasi, asistensi, sinergisitas dan monitoring perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5.01.03.2.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.2.02.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.2.02.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
			Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan		Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
				Meningkatnya pengembangan inovasi dan teknologi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	5.05.02.2.04.0001 - Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	5.05.02.2.04.0004 - Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	
			Meningkatnya pemanfaatan inovasi		Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			daerah dalam pembangunan	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	
					Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	5.05.03.2.01.0001 - Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	

Berdasarkan dokumen rencana strategis yang tertuang dalam NSPK dan sasaran RPJMD, Bappeda memiliki mandat utama untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, penguatan fasilitasi kinerja perangkat daerah, serta pemanfaatan hasil kelitbangan dan inovasi. Fokus arah kebijakan mencakup peningkatan kualitas tata kelola perencanaan, efektivitas koordinasi lintas sektor, serta optimalisasi pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Secara umum, outcome yang ingin dicapai adalah terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, pengelolaan administrasi keuangan yang tertib, penguatan fungsi kelitbangan dalam mendukung perencanaan, serta peningkatan pemanfaatan inovasi daerah untuk mendorong pembangunan yang berdaya saing. Hal ini diturunkan dalam berbagai output, antara lain penyediaan dokumen perencanaan yang sinkron, laporan evaluasi kinerja pembangunan, dokumen hasil penelitian dan pengembangan, hingga dokumen inovasi daerah yang dapat diintegrasikan dalam kebijakan. Indikator kinerja yang digunakan meliputi Nilai SAKIP, Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah, nilai komponen perencanaan dalam SAKIP, serta capaian dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi. Dengan indikator tersebut, arah kebijakan Bappeda menekankan peningkatan efektivitas kelembagaan, keterpaduan perencanaan, serta peningkatan kualitas layanan administrasi dan tata kelola internal.

Untuk mewujudkan sasaran dan outcome tersebut, Bappeda merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terintegrasi dengan pendanaan. Program utama difokuskan pada peningkatan perencanaan, pengendalian, evaluasi, serta litbang dan inovasi. Setiap program diturunkan ke dalam kegiatan strategis, seperti penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan, penguatan forum koordinasi perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta fasilitasi kegiatan litbang dan inovasi. Kegiatan tersebut kemudian dijabarkan lebih rinci dalam bentuk sub kegiatan, misalnya penyusunan RKPDP, pengendalian capaian pembangunan, penyusunan laporan evaluasi, pengelolaan data dan informasi pembangunan, hingga pelaksanaan riset terapan. Seluruhnya diarahkan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dari sisi pendanaan, alokasi anggaran disusun sesuai prioritas program dan kegiatan, dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan kebutuhan strategis pembangunan. Pengelolaan pendanaan diarahkan pada efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga setiap rupiah yang dialokasikan dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas perencanaan dan pembangunan daerah.

Tabel IV.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01 - PERENCANAAN				6.166.052.043,80		7.097.081.915,94		7.294.172.531,10		7.450.014.896,41		8.240.513.245,86		
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.644.941.193,80		5.123.081.915,94		5.144.172.531,10		5.140.014.896,41		5.625.513.245,86		
Meningkatnya tata kelola pemerintah pada BAPPEDA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel dan tepat Waktu (%)	100	100	4.644.941.193,80	100	5.123.081.915,94	100	5.144.172.531,10	100	5.140.014.896,41	100	5.625.513.245,86	5.01.5.05.0.00.26.00 00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				45.878.100,00		48.000.000,00		50.000.000,00		53.000.000,00		54.500.000,00		
Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Bappeda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10	10	45.878.100,00	100	48.000.000,00	100	50.000.000,00	100	53.000.000,00	100	54.500.000,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	5		5		5		5		5			
5.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				23.682.550,00		25.000.000,00		26.000.000,00		28.000.000,00		28.500.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10	10	23.682.550,00	100	25.000.000,00	100	26.000.000,00	100	28.000.000,00	100	28.500.000,00		
5.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				22.195.550,00		23.000.000,00		24.000.000,00		25.000.000,00		26.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	5	22.195.550,00	5	23.000.000,00	5	24.000.000,00	5	25.000.000,00	5	26.000.000,00		
5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.772.250.213,80		3.809.001.515,94		3.850.236.531,10		3.890.338.896,41		4.215.137.245,86		
Tersusunnya administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	3.772.250.213,80	12	3.809.001.515,94	12	3.850.236.531,10	12	3.890.338.896,41	12	4.215.137.245,86		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30	43		43		43		43		43			
5.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.637.130.213,80		3.673.501.515,94		3.710.236.531,10		3.747.338.896,41		4.070.137.245,86		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30	43	3.637.130.213,80	43	3.673.501.515,94	43	3.710.236.531,10	43	3.747.338.896,41	43	4.070.137.245,86		
5.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				135.120.000,00		135.500.000,00		140.000.000,00		143.000.000,00		145.000.000,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	135.120.000,00	12	135.500.000,00	12	140.000.000,00	12	143.000.000,00	12	145.000.000,00		

Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN				
			2026		2027		2028		2029		2030							
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU						
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
5.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				0,00		75.000.000,00		75.000.000,00		0,00		75.000.000,00						
Terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	-	-	0,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	-	0,00	1	75.000.000,00						
5.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		75.000.000,00		75.000.000,00		0,00		75.000.000,00						
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	-	-	0,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	-	0,00	1	75.000.000,00						
5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				10.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00						
Terselenggaranya pengelolaan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2	2	10.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	5	25.000.000,00						
5.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00						
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2	2	10.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	5	25.000.000,00						
5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				306.117.940,00		502.084.400,00		471.880.000,00		492.680.000,00		561.880.000,00						
Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	72	30	306.117.940,00	35	502.084.400,00	42	471.880.000,00	50	492.680.000,00	52	561.880.000,00						
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4		4	4	4	4		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4		4	4	4	4		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3		3	3	3	3		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	0		3		4		4		4		4	5	5	5		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3		3	3	3	3		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	3		3		3		3		3		3	3	3	3		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	-	0		1						1			1		1		
5.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.532.000,00		10.000.000,00		12.000.000,00		15.000.000,00		16.500.000,00						
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	9.532.000,00	3	10.000.000,00	3	12.000.000,00	3	15.000.000,00	3	16.500.000,00						
5.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		136.500.000,00		143.000.000,00		150.000.000,00		157.500.000,00						

Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	0	0,00	3	136.500.000,00	4	143.000.000,00	4	150.000.000,00	5	157.500.000,00		
5.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				11.098.540,00		12.000.000,00		12.500.000,00		13.000.000,00		13.200.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3	3	11.098.540,00	3	12.000.000,00	3	12.500.000,00	3	13.000.000,00	3	13.200.000,00		
5.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				27.278.000,00		27.278.000,00		27.500.000,00		27.800.000,00		27.800.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	27.278.000,00	4	27.278.000,00	4	27.500.000,00	4	27.800.000,00	4	27.800.000,00		
5.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				22.426.400,00		22.426.400,00		23.000.000,00		23.000.000,00		23.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4	22.426.400,00	4	22.426.400,00	4	23.000.000,00	4	23.000.000,00	4	23.000.000,00		
5.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				33.880.000,00		33.880.000,00		33.880.000,00		33.880.000,00		33.880.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	3	33.880.000,00	3	33.880.000,00	3	33.880.000,00	3	33.880.000,00	3	33.880.000,00		
5.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				201.903.000,00		210.000.000,00		220.000.000,00		230.000.000,00		240.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	72	30	201.903.000,00	35	210.000.000,00	42	220.000.000,00	50	230.000.000,00	52	240.000.000,00		
5.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0,00		50.000.000,00		0,00		0,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	-	0	0,00	1	50.000.000,00		0,00	1	0,00	1	50.000.000,00		
5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				224.216.440,00		179.000.000,00		186.500.000,00		194.000.000,00		204.000.000,00		
Terpenuhi nya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	-	2	224.216.440,00	3	179.000.000,00	3	186.500.000,00	3	194.000.000,00	3	204.000.000,00		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	9		6		6		6		6			
5.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				20.854.000,00		32.000.000,00		32.500.000,00		33.000.000,00		35.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	-	2	20.854.000,00	3	32.000.000,00	3	32.500.000,00	3	33.000.000,00	3	35.000.000,00		
5.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				203.362.440,00		147.000.000,00		154.000.000,00		161.000.000,00		169.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	9	203.362.440,00	6	147.000.000,00	6	154.000.000,00	6	161.000.000,00	6	169.000.000,00		
5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				136.770.000,00		151.940.000,00		152.500.000,00		151.940.000,00		151.940.000,00		
Terpenuhi nya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	136.770.000,00	1	151.940.000,00	1	152.500.000,00	1	151.940.000,00	1	151.940.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		1		1		1		1		1			

Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
5.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
5.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				111.390.000,00		126.440.000,00		127.000.000,00		126.440.000,00		126.440.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		1	111.390.000,00	1	126.440.000,00	1	127.000.000,00	1	126.440.000,00	1	126.440.000,00		
5.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.380.000,00		20.500.000,00		20.500.000,00		20.500.000,00		20.500.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	20.380.000,00	1	20.500.000,00	1	20.500.000,00	1	20.500.000,00	1	20.500.000,00		
5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				149.708.500,00		338.056.000,00		338.056.000,00		338.056.000,00		338.056.000,00		
Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	0	149.708.500,00	1	338.056.000,00	1	338.056.000,00	1	338.056.000,00	1	338.056.000,00		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	9	7		7		7		7		7			
5.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				149.708.500,00		188.056.000,00		188.056.000,00		188.056.000,00		188.056.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	9	7	149.708.500,00	7	188.056.000,00	7	188.056.000,00	7	188.056.000,00	7	188.056.000,00		
5.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	0	0,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				1.152.041.950,00		1.319.000.000,00		1.340.000.000,00		1.470.000.000,00		1.745.000.000,00		
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	100	100	1.152.041.950,00	100	1.319.000.000,00	100	1.340.000.000,00	100	1.470.000.000,00	100	1.745.000.000,00	5.01.5.05.0.00.26.00 00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah (Persentase)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	100	100		100		100		100		100			
5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				877.814.250,00		1.005.000.000,00		1.010.000.000,00		1.120.000.000,00		1.405.000.000,00		

Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya perencanaan dan pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	5	5	877.814.250,00	3	1.005.000.000,00	4	1.010.000.000,00	4	1.120.000.000,00	5	1.405.000.000,00		
	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	3	3		3		3		3		3			
5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota				421.997.000,00		505.000.000,00		510.000.000,00		520.000.000,00		600.000.000,00		
Terfaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Benta Acara)	3	3	421.997.000,00	3	505.000.000,00	3	510.000.000,00	3	520.000.000,00	3	600.000.000,00		
5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				455.817.250,00		500.000.000,00		500.000.000,00		600.000.000,00		805.000.000,00		
Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	5	5	455.817.250,00	3	500.000.000,00	4	500.000.000,00	4	600.000.000,00	5	805.000.000,00		
5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				97.923.450,00		124.000.000,00		130.000.000,00		140.000.000,00		145.000.000,00		
Tersusunnya dokumen analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanana pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	2	2	97.923.450,00	2	124.000.000,00	2	130.000.000,00	2	140.000.000,00	2	145.000.000,00		
5.01.02.2.02.0001 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah				97.923.450,00		124.000.000,00		130.000.000,00		140.000.000,00		145.000.000,00		
Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	2	2	97.923.450,00	2	124.000.000,00	2	130.000.000,00	2	140.000.000,00	2	145.000.000,00		
5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				176.304.250,00		190.000.000,00		200.000.000,00		210.000.000,00		195.000.000,00		
Tersusunnya dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanana pembangunan daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	212	4	176.304.250,00	4	190.000.000,00	4	200.000.000,00	4	210.000.000,00	4	195.000.000,00		
5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah				176.304.250,00		190.000.000,00		200.000.000,00		210.000.000,00		195.000.000,00		
Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	212	4	176.304.250,00	4	190.000.000,00	4	200.000.000,00	4	210.000.000,00	4	195.000.000,00		
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				369.068.900,00		655.000.000,00		810.000.000,00		840.000.000,00		870.000.000,00		
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	100	100	142.841.200,00	100	200.000.000,00	100	230.000.000,00	100	235.000.000,00	100	245.000.000,00	5.01.5.05.0.00.26.00 00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				142.841.200,00		200.000.000,00		230.000.000,00		235.000.000,00		245.000.000,00		

Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Meningkatnya koordinasi, asistensi, sinergisitas dan monitoring perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	28	28	142.841.200,00	28	200.000.000,00	28	230.000.000,00	28	235.000.000,00	28	245.000.000,00				
5.01.03.2.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				142.841.200,00		200.000.000,00		230.000.000,00		235.000.000,00		245.000.000,00				
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	28	28	142.841.200,00	28	200.000.000,00	28	230.000.000,00	28	235.000.000,00	28	245.000.000,00				
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	100	100	119.097.100,00	100	200.000.000,00	100	230.000.000,00	100	235.000.000,00	100	245.000.000,00				
5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				119.097.100,00		200.000.000,00		230.000.000,00		235.000.000,00		245.000.000,00				
Meningkatnya koordinasi, asistensi, sinergisitas dan monitoring perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	16	16	119.097.100,00	16	200.000.000,00	16	230.000.000,00	16	235.000.000,00	16	245.000.000,00				
5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				119.097.100,00		200.000.000,00		230.000.000,00		235.000.000,00		245.000.000,00				
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	16	16	119.097.100,00	16	200.000.000,00	16	230.000.000,00	16	235.000.000,00	16	245.000.000,00				
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	100	100	107.130.600,00	100	255.000.000,00	100	350.000.000,00	100	370.000.000,00	100	380.000.000,00				
5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				107.130.600,00		255.000.000,00		350.000.000,00		370.000.000,00		380.000.000,00				
Meningkatnya koordinasi, asistensi, sinergisitas dan monitoring perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	0	0	107.130.600,00	9	255.000.000,00	9	350.000.000,00	9	370.000.000,00	9	380.000.000,00				
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	0	0		9		9		9		9					

Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	9	9		9		9		9		9			
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	0	0		9		9		9		9			
5.01.03.2.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				107.130.600,00		200.000.000,00		230.000.000,00		235.000.000,00		245.000.000,00		
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	9	9	107.130.600,00	9	200.000.000,00	9	230.000.000,00	9	235.000.000,00	9	245.000.000,00		
5.01.03.2.02.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				0,00		20.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	0	0	0,00	9	20.000.000,00	9	40.000.000,00	9	45.000.000,00	9	45.000.000,00		
5.01.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				0,00		20.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	0	0	0,00	9	20.000.000,00	9	40.000.000,00	9	45.000.000,00	9	45.000.000,00		
5.01.03.2.02.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian				0,00		15.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	0	0	0,00	9	15.000.000,00	9	40.000.000,00	9	45.000.000,00		45.000.000,00		
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				296.000.000,00		395.000.000,00		425.000.000,00		450.000.000,00		475.000.000,00		
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				176.000.000,00		235.000.000,00		250.000.000,00		270.000.000,00		290.000.000,00		
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	-	100	176.000.000,00	100	235.000.000,00	100	250.000.000,00	100	270.000.000,00	100	290.000.000,00	5.01.5.05.0.00.26.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi				176.000.000,00		235.000.000,00		250.000.000,00		270.000.000,00		290.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pengembangan inovasi dan teknologi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	1	1	176.000.000,00	1	235.000.000,00	1	250.000.000,00	1	270.000.000,00	1	290.000.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	1	1		1		1		1					
5.05.02.2.04.0001 - Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				80.000.000,00		110.000.000,00		120.000.000,00		132.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	1	1	80.000.000,00	1	110.000.000,00	1	120.000.000,00	1	132.000.000,00	1	150.000.000,00		
5.05.02.2.04.0004 - Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				96.000.000,00		125.000.000,00		130.000.000,00		138.000.000,00		140.000.000,00		
Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	1	1	96.000.000,00	1	125.000.000,00	1	130.000.000,00	1	138.000.000,00	1	140.000.000,00		
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH				120.000.000,00		160.000.000,00		175.000.000,00		180.000.000,00		185.000.000,00		
Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	-	22,22	120.000.000,00	25,93	160.000.000,00	29,63	175.000.000,00	33,33	180.000.000,00	37,04	185.000.000,00	5.01.5.05.0.00.26.00 00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan				120.000.000,00		160.000.000,00		175.000.000,00		180.000.000,00		185.000.000,00		
Terselenggaranya pemantauana dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	-	4	120.000.000,00	4	160.000.000,00	4	175.000.000,00	4	180.000.000,00	4	185.000.000,00		
5.05.03.2.01.0001 - Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan				120.000.000,00		160.000.000,00		175.000.000,00		180.000.000,00		185.000.000,00		
Terlaksananya pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	-	4	120.000.000,00	4	160.000.000,00	4	175.000.000,00	4	180.000.000,00	4	185.000.000,00		

Setiap subkegiatan dijabarkan secara rinci untuk memastikan kontribusinya terhadap output dan outcome program, serta untuk memudahkan proses pemantauan, evaluasi, dan peningkatan akuntabilitas publik. Dengan format yang terukur, tabel ini berfungsi sebagai alat bantu perencanaan teknokratik yang fleksibel, sehingga dapat disesuaikan secara adaptif terhadap dinamika pembangunan dan perubahan kebutuhan masyarakat di bidang perencanaan pembangunan daerah. Berikut disajikan tabel subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatifnya.

IV.4. Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Subkegiatan prioritas dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah yang disusun secara terarah dan terukur berdasarkan outcome, serta kegiatan. Subkegiatan ini merupakan bagian dari penguatan implementasi program prioritas Bappeda Kabupaten Rejang Lebong. Penyusunan daftar ini juga mempertimbangkan beberapa hal diantaranya dokumen RPJMD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025-2029, dinamika kebutuhan masyarakat, serta prinsip efektivitas dan efisiensi anggaran. Dengan pendekatan tersebut, subkegiatan prioritas ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target kinerja perangkat daerah dan mendorong akselerasi transformasi sektor-sektor strategis secara berkelanjutan. **Tabel IV.3** merupakan tabel sub kegiatan prioritas Bappeda Kabupaten Rejang Lebong.

Tabel IV.3 Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
5.01.5.05.0.00.26.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
1,	5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya tata kelola pemerintah pada BAPPEDA	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			5.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			5.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
2,	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
			5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			Musrenbang Kabupaten/Kota	
			5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
			5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
			5.01.02.2.02.0001 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
			5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
			5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
3,	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
			5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
			5.01.03.2.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			5.01.03.2.02.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
			5.01.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			5.01.03.2.02.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
			5.01.03.2.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
4,	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
			5.05.02.2.04.0001 - Penelitian, Pengembangan, dan Perkayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
			5.05.02.2.04.0004 - Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	
5,	5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	
			5.05.03.2.01.0001 - Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	

Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah ditempuh melalui serangkaian program prioritas yang saling melengkapi. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah menjadi landasan utama dengan memastikan setiap dokumen perencanaan tersusun secara partisipatif melalui Musrenbang, berbasis data melalui analisis informasi pembangunan, serta terpantau pelaksanaannya melalui kegiatan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan berkala. Selanjutnya, program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah memperkuat integrasi antarbidang—baik pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian, SDA, maupun infrastruktur dan kewilayahan—dengan mengedepankan sinergisitas dan harmonisasi antar perangkat daerah. Hal ini mendorong keselarasan antara dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dengan kebijakan pembangunan lintas sektor dan wilayah.

Untuk memperkuat basis pengetahuan dalam perencanaan, program Penelitian dan Pengembangan Daerah menghadirkan hasil riset, inovasi, serta perekayasaan teknologi yang relevan dengan kebutuhan pembangunan. Hasil kelitbangan tersebut tidak hanya berhenti pada penelitian, tetapi juga disosialisasikan dan didiseminasikan agar dapat dimanfaatkan secara luas oleh pemangku kepentingan. Sebagai penguatan, program Riset dan Inovasi Daerah diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan inovasi lokal dalam pembangunan melalui pemantauan, evaluasi, serta penerapan hasil penelitian dan pengembangan. Dengan demikian, perencanaan pembangunan daerah tidak hanya mengandalkan pendekatan administratif, tetapi juga berbasis pada ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi.

Keterpaduan keempat program tersebut mendukung terwujudnya sasaran strategis pembangunan daerah, yaitu tersusunnya perencanaan yang berkualitas, partisipatif, dan berbasis data, sekaligus adaptif terhadap tantangan global. Lebih jauh, pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam pembangunan memperkuat daya saing daerah serta memastikan arah pembangunan berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan sesuai prinsip good governance.

IV.5. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) disusun berdasarkan sasaran strategis yang tercantum dalam Renstra, dan bertujuan untuk menggambarkan hasil nyata dari pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan daerah. Penetapan IKU dilakukan secara selektif, terukur, dan sesuai dengan mandat kelembagaan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong, dengan tetap mempertimbangkan keterkaitannya dengan indikator kinerja kepala daerah, indikator dalam dokumen RPJMD, serta dokumen perencanaan di tingkat nasional dan provinsi.

Tabel IV.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Nilai SAKIP OPD	nilai	BB	BB	BB	BB	BB	A	
2	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	nilai	22,18	22,25	22,32	22,39	22,46	22,53	
3	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan riset dan inovasi daerah	persen	100	100	100	100	100	100	

IKU juga menjadi acuan utama dalam proses evaluasi kinerja perangkat daerah melalui sistem SAKIP dan Perjanjian Kinerja tahunan. Dengan adanya indikator yang jelas dan terarah, seluruh unit kerja di lingkungan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong diharapkan dapat bergerak secara terpadu untuk mendukung terciptanya perencanaan pembangunan

yang berkualitas, berbasis data, dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong.

Indikator yang ditetapkan dalam tabel di atas secara langsung mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah, khususnya dalam peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan inovatif. Nilai Evaluasi SAKIP OPD yang ditargetkan meningkat dari BB menuju A pada tahun 2030 menunjukkan adanya komitmen kuat untuk memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan yang lebih terintegrasi. Hal ini diperkuat dengan indikator Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja yang secara konsisten meningkat setiap tahun, menandakan adanya perbaikan kualitas perencanaan yang menjadi fondasi bagi keberhasilan pelaksanaan program pembangunan. Sementara itu, indikator Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah yang ditargetkan mencapai 100 persen setiap tahun memastikan bahwa seluruh perangkat daerah memiliki dukungan dalam mengembangkan dan menerapkan inovasi. Kehadiran inovasi menjadi faktor penting untuk meningkatkan efisiensi layanan, mempercepat adaptasi terhadap perubahan, serta mendorong lahirnya solusi kreatif yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan sinergi ketiga indikator tersebut, sasaran peningkatan kinerja pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif dapat tercapai secara berkelanjutan hingga akhir periode perencanaan.

IV.6. Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan alat utama untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah dirumuskan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Rejang Lebong. IKK disusun untuk menjamin bahwa pencapaian kinerja dapat diukur dengan jelas, memiliki arah yang terfokus, serta mendukung akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan selama periode perencanaan tahun 2025–2029. Keberadaan IKK menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi yang objektif dan berbasis data untuk menilai efektivitas dan efisiensi pencapaian sasaran strategis Bappeda.

Tabel IV.5 Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	%	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	nilai	18,52	22,22	25,93	29,63	33,33	37,04	

Setiap IKK dirancang dengan mengacu pada prinsip SMART (Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound), serta selaras dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, seperti RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025–2029 dan pohon kinerja perangkat daerah. Dengan indikator yang terukur, spesifik, dan sejalan dengan arah sasaran strategis, maka perencanaan kinerja lima tahunan Bappeda menjadi lebih fokus dan terstruktur. IKK juga memainkan peran penting dalam mendorong tata kelola organisasi yang akuntabel, transparan, dan partisipatif, sesuai dengan prinsip manajemen berbasis hasil (result-based management). Selain itu, penetapan IKK menjadi landasan dalam pelaksanaan fungsi pengendalian dan pelaporan kinerja secara berkala, sehingga memperkuat akuntabilitas publik terhadap capaian pembangunan daerah selama periode perencanaan berlangsung.

Indikator yang ditetapkan juga mencerminkan orientasi pembangunan daerah yang selaras dengan kebijakan nasional sekaligus responsif terhadap kebutuhan lokal melalui inovasi. Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah yang ditargetkan konsisten 100 persen setiap tahun menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga sinkronisasi perencanaan, sehingga pelaksanaan pembangunan di daerah sejalan dengan arah pembangunan nasional. Hal ini penting agar kebijakan daerah tidak berjalan sendiri, melainkan terintegrasi dalam kerangka pembangunan yang lebih luas. Selanjutnya, Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan landasan implementasi pembangunan juga ditargetkan 100 persen, yang menandakan bahwa seluruh rekomendasi hasil kajian dan perencanaan benar-benar diadopsi dalam pelaksanaan program. Dengan demikian, kebijakan pembangunan daerah tidak hanya berbasis pada instruksi, tetapi berlandaskan pada analisis dan rekomendasi yang komprehensif, sehingga implementasi menjadi lebih tepat sasaran.

Sementara itu, indikator persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah memperlihatkan tren peningkatan signifikan dari 18,52 pada tahun 2025 menjadi 37,04 pada tahun 2030. Kenaikan ini menggambarkan adanya dorongan kuat untuk memperluas pemanfaatan hasil inovasi daerah oleh berbagai pemangku kepentingan. Hal ini tidak hanya mendorong efisiensi layanan publik, tetapi juga membuka peluang penguatan daya saing daerah melalui kolaborasi dengan masyarakat, industri, dan dunia usaha. Dengan terpenuhinya ketiga indikator tersebut, sasaran pembangunan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang selaras dengan kebijakan nasional, berbasis rekomendasi yang terukur, serta inovatif dan adaptif terhadap perkembangan dapat tercapai secara konsisten hingga akhir periode perencanaan.



BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan strategis perangkat daerah yang memuat arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah jangka menengah lima tahunan. Renstra ini berfungsi sebagai acuan utama bagi Bappeda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memastikan terbangunnya sistem perencanaan yang terpadu, terukur, inklusif, dan berkelanjutan di Kabupaten Rejang Lebong.

Dokumen ini menguraikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, serta indikator kinerja utama yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan pembangunan daerah, khususnya dalam peran koordinatif, fasilitatif, dan sinkronisasi yang diemban oleh Bappeda. Penyusunan Renstra ini mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), keterbukaan, akuntabilitas, serta partisipasi aktif dari pemangku kepentingan.

Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025–2029 disusun dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) secara terpadu. Pendekatan ini bertujuan untuk menjamin keselarasan antara kebutuhan masyarakat, arah pembangunan daerah, serta konsistensi terhadap dokumen perencanaan yang lebih tinggi seperti RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025–2029, RPJPD 2025–2045, serta RPJMN 2025–2029.

Renstra ini mendukung terwujudnya visi pembangunan Kabupaten Rejang Lebong yang ditetapkan dalam RPJMD, dengan menjabarkan peran Bappeda secara strategis dalam

1. Perencanaan yang Profesional dan Inovatif – Mengembangkan sistem perencanaan pembangunan yang berbasis data dan *evidence-based planning*.
2. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan yang Objektif – Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi pembangunan secara berkala, dengan melibatkan multipihak.
3. Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan – Mewujudkan keselarasan antar dokumen perencanaan pusat, provinsi, dan daerah.
4. Kolaborasi Pentahelix – Mendorong keterlibatan dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam mendukung agenda pembangunan daerah.
5. Inovasi Daerah dan Tata Kelola Pemerintahan – Menjadi motor penggerak dalam pengembangan inovasi kebijakan dan peningkatan kapasitas perencanaan.

Sebagai dokumen operasional perencanaan di tingkat perangkat daerah, Renstra Bappeda menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Bappeda, serta mendukung keterpaduan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran sesuai tugas pokok dan fungsi Bappeda. Renstra ini juga menjadi rujukan dalam pengukuran kinerja organisasi melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan evaluasi lainnya.

V.2. Kaidah Pelaksanaan

Agar pelaksanaan Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong dapat berjalan efektif dan terarah, maka perlu memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan berikut:

1. **Konsistensi Perencanaan:** Renstra ini menjadi acuan utama dalam penyusunan Renja, RKPD, serta mendukung penyusunan KUA-PPAS dan APBD sesuai arah kebijakan pembangunan jangka menengah.
2. **Sinergi dan Kolaborasi:** Perencanaan pembangunan daerah perlu mengedepankan kolaborasi lintas perangkat daerah dan kerja sama dengan akademisi, sektor swasta, dan masyarakat.
3. **Berbasis Data dan Bukti:** Seluruh penyusunan kebijakan dan strategi perencanaan harus mengacu pada data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
4. **Fleksibilitas dan Adaptasi:** Renstra Bappeda harus responsif terhadap dinamika pembangunan, baik perubahan regulasi, kondisi ekonomi, maupun bencana dan krisis global.
5. **Partisipasi dan Inklusivitas:** Pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan evaluasi menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas dan legitimasi kebijakan.

V.3. Pengendalian dan Evaluasi

Bappeda Kabupaten Rejang Lebong akan menerapkan sistem pengendalian dan evaluasi secara menyeluruh untuk menjamin pelaksanaan program berjalan efektif dan akuntabel:

1. **Monitoring dan Evaluasi Berbasis Kinerja :** Pemantauan pencapaian indikator kinerja utama dan indikator kegiatan dilakukan secara berkala untuk memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran.
2. **Pelaporan Berkala:** Penyusunan laporan kinerja perangkat daerah, laporan evaluasi RKPD, dan laporan tematik lainnya sebagai bentuk akuntabilitas publik.
3. **Forum Evaluasi dan Umpan Balik:** Pelibatan lintas sektor dalam forum evaluasi pembangunan untuk merumuskan rekomendasi dan perbaikan berkelanjutan.
4. **Rekomendasi dan Perbaikan Berkelanjutan:** Hasil evaluasi menjadi dasar pengambilan keputusan strategis dan penyesuaian arah kebijakan serta strategi program.
5. **Pengawasan oleh DPRD dan Masyarakat:** Mendorong keterlibatan DPRD dan publik dalam memantau pelaksanaan Renstra Bappeda secara transparan dan partisipatif.



**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2025**